

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/  
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal 77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), Pasal 77F ayat (4) dan Pasal 77K ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN.

Pasal 1

- (1) Kurikulum pada sekolah menengah kejuruan /madrasah aliyah kejuruan yang telah dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- (2) Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kerangka Dasar Kurikulum;
  - b. Struktur Kurikulum;
  - c. Silabus; dan
  - d. Pedoman Mata Pelajaran.

## Pasal 2

Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

## Pasal 3

- (1) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (2) Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan pada setiap tingkat kelas.
- (3) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kompetensi Inti sikap spiritual;
  - b. Kompetensi Inti sikap sosial;
  - c. Kompetensi Inti pengetahuan; dan
  - d. Kompetensi Inti keterampilan.
- (4) Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang mengacu pada Kompetensi Inti.
- (5) Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari Kompetensi Inti dan terdiri atas:
  - a. Kompetensi Dasar sikap spiritual;
  - b. Kompetensi Dasar sikap sosial;
  - c. Kompetensi Dasar pengetahuan; dan
  - d. Kompetensi Dasar keterampilan.

## Pasal 4

Kerangka Dasar Kurikulum dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

- (1) Mata pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan atas:
  - a. mata pelajaran umum Kelompok A;
  - b. mata pelajaran umum Kelompok B; dan
  - c. mata pelajaran peminatan kejuruan Kelompok C.
- (2) Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.
- (4) Mata pelajaran peminatan kejuruan Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan dalam Bidang Kejuruan, Program Kejuruan, dan Paket Kejuruan.
- (5) Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran peminatan kejuruan Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah.
- (6) Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan.
- (7) Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
  - b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Matematika;
  - e. Sejarah Indonesia; dan
  - f. Bahasa Inggris.

- (8) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Seni Budaya;
  - b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
  - c. Prakarya dan Kewirausahaan.
- (9) Mata pelajaran Seni Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c masing-masing berisikan pilihan muatan untuk memperkuat Program Kejuruan.
- (10) Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
- (11) Mata pelajaran peminatan Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan secara bertingkat atas:
  - a. Dasar Bidang Kejuruan;
  - b. Dasar Program Kejuruan; dan
  - c. Paket Kejuruan.
- (12) Mata pelajaran Dasar Bidang Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dikelompokkan atas:
  - a. Bidang Kejuruan Teknologi dan Rekayasa;
  - b. Bidang Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - c. Bidang Kejuruan Kesehatan;
  - d. Bidang Kejuruan Agribisnis dan Agroteknologi;
  - e. Bidang Kejuruan Perikanan dan Kelautan;
  - f. Bidang Kejuruan Bisnis dan Manajemen;
  - g. Bidang Kejuruan Pariwisata;
  - h. Bidang Kejuruan Seni Rupa dan Kriya; dan
  - i. Bidang Kejuruan Seni Pertunjukan.
- (13) Mata pelajaran Dasar Program Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b merupakan muatan-substantif pengikat yang berfungsi sebagai fokus utama dari Program Kejuruan tersebut.
- (14) Mata pelajaran untuk Paket Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c merupakan muatan Kejuruan spesifik dalam lingkup Paket Kejuruan.
- (15) Mata pelajaran untuk Dasar Program Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan mata pelajaran untuk Paket Kejuruan sebagaimana

dimaksud pada ayat (14) dikembangkan secara kolaboratif antara unsur-unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan asosiasi profesi terkait Bidang Kejuruan dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.

#### Pasal 6

- (1) Dasar Bidang Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf a sampai dengan huruf i masing-masing memiliki muatan-substantif pengikat yang berfungsi sebagai fokus utama dari Bidang Kejuruan tersebut.
- (2) Bidang Kejuruan Teknologi dan Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf a memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran Fisika, Mata Pelajaran Kimia, dan Mata Pelajaran Gambar Teknik.
- (3) Bidang Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf b memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran Fisika, Mata Pelajaran Pemrograman Dasar, dan Mata Pelajaran Sistem Komputer.
- (4) Bidang Kejuruan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf c memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran Fisika, Mata Pelajaran Kimia, dan Mata Pelajaran Biologi.
- (5) Bidang Kejuruan Agribisnis dan Agroteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf d memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran Fisika, Mata Pelajaran Kimia, dan Mata Pelajaran Biologi.
- (6) Bidang Kejuruan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf e memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran Fisika, Mata Pelajaran Kimia, dan Mata Pelajaran Biologi.
- (7) Bidang Kejuruan Bisnis dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf f memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran Pengantar Ekonomi dan Bisnis, Mata Pelajaran Pengantar Akuntansi, dan Mata Pelajaran Pengantar Administrasi Perkantoran.
- (8) Bidang Kejuruan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf g memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran IPA Terapan dan Mata Pelajaran Pengantar Pariwisata.
- (9) Bidang Kejuruan Seni Rupa dan Kriya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf h memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata Pelajaran Dasar-Dasar Desain dan Mata Pelajaran Pengetahuan Bahan.
- (10) Bidang Kejuruan Seni Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) huruf i memiliki muatan-substantif pengikat berupa Mata

Pelajaran Wawasan Seni Pertunjukan, Mata Pelajaran Tata Teknik Pentas, dan Mata Pelajaran Manajemen Pertunjukan.

#### Pasal 7

- (1) Madrasah aliyah kejuruan dapat menambah mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam dan bahasa arab selain Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam dan bahasa arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 8

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas), dan kelas XII (dua belas), atau dengan 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas), kelas XII (dua belas), dan kelas XIII (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan dengan 4 (empat) tingkatan kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

#### Pasal 9

- (1) Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran.
- (2) Beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan terdiri atas:
  - a. kegiatan tatap muka;
  - b. kegiatan terstruktur; dan
  - c. kegiatan mandiri.
- (3) Beban belajar kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (4) Beban belajar kegiatan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak 60% (enam puluh persen) dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

- (5) Beban belajar satu minggu untuk Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII masing-masing adalah 48 (empat puluh delapan) jam pembelajaran.
- (6) Beban belajar satu semester di Kelas X dan Kelas XI masing-masing paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif.
- (7) Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif dan pada semester genap paling sedikit 14 (empat belas) minggu efektif.

#### Pasal 10

Silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

#### Pasal 11

- (1) Silabus Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dikelompokkan atas:
  - a. silabus mata pelajaran umum Kelompok A;
  - b. silabus mata pelajaran umum Kelompok B; dan
  - c. silabus mata pelajaran peminatan Kelompok C.
- (2) Silabus mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan oleh Pemerintah.
- (3) Silabus mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah.
- (4) Silabus mata pelajaran peminatan Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan oleh Pemerintah.
- (5) Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pendidik sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (6) Silabus Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Pedoman Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan profil utuh mata pelajaran yang berisi latar belakang, karakteristik mata pelajaran, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata



pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar, dan peran guru sebagai pengembang budaya sekolah.

- (2) Pedoman Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pedoman Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pendidik untuk:
  - a. memahami secara utuh mata pelajaran sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; dan
  - b. acuan dalam penyusunan dan penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran.
- (4) Pedoman Mata Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 956

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001